

DEVIASI CAPAIAN DAN HAMBATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA TANGERANG SELATAN

Afif Ramadhan¹, Mawar²

Universitas Muhammadiyah Jakarta

afiframadhan913@gmail.com¹, mawar@umj.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengukur deviasi capaian implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan data kinerja yang tersedia, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat beserta hierarki relatifnya melalui kerangka empat dimensi Edwards III komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Permasalahan utama yang dikemukakan adalah kesenjangan antara target JAKSTRADA (30% pengurangan sampah pada 2025) dan realisasi yang baru menyentuh 13,2% pada 2023 deviasi 16,8 poin persentase di tengah tekanan timbulan yang terus naik rata-rata 2,5% per tahun (CAGR), dari 972,63 ton/hari (2022) menjadi 1.022,00 ton/hari (2024). Metode yang digunakan adalah analisis dokumen dengan analisis isi deduktif dalam paradigma interpretivist-konstruktivist; data diambil dari LKjIP DLH Kota Tangerang Selatan 2024 dan Perwali No. 79/2021 sebagai dokumen JAKSTRADA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas TPS3R dan fragmentasi koordinasi lintas instansi tanpa mekanisme pemantauan yang terukur merupakan hambatan struktural dengan kendala langsung dan efek lintas dimensi tertinggi, sementara hambatan komunikasi dan disposisi pelaksana bersifat kondisional. Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan mencapai target kebijakan pengelolaan sampah berakar dari defisit struktural yang menumpuk, bukan semata kelemahan teknis atau perilaku pelaksana.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Edwards III, Deviasi Kinerja, Analisis Dokumen

ABSTRACT

This research aims to measure the magnitude of the implementation gap in solid waste management policy in South Tangerang City based on available performance data, and to identify inhibiting factors along with their relative hierarchy through Edwards III's four-dimensional framework communication, resources, implementing disposition, and bureaucratic structure. The core problem is the gap between the JAKSTRADA target (30% waste reduction by 2025) and the actual achievement of only 13.2% in 2023 a deviation of 16.8 percentage points amid rising waste generation pressure averaging 2.5% per year (CAGR), from 972.63 tons/day (2022) to 1,022.00 tons/day (2024). The method employed is document analysis with deductive content analysis within an interpretivist-constructivist paradigm. The findings show that limited TPS3R capacity and fragmented inter-agency coordination without measurable monitoring mechanisms are structural barriers with the highest direct constraints and cross-dimensional effects, while

communication and disposition barriers are conditional. This study contributes to policy implementation literature by integrating performance gap measurement and structured qualitative comparison within Edwards III framework.

Keywords: ***Policy Implementation, Waste Management, Edwards III, Performance Deviation, Document Analysis***

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah perkotaan merupakan salah satu tantangan kebijakan publik yang belum terpecahkan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Amaysah et al., 2024). (Zhang et al., 2024) mendokumentasikan bahwa di kawasan Asia dan Afrika, pertumbuhan volume timbunan sampah secara konsisten melampaui kapasitas infrastruktur pengelolaan yang tersedia, sehingga kesenjangan antara kebijakan dan implementasi menjadi persoalan struktural yang berulang. Di Indonesia, urgensi ini mendapat pengakuan di level regulasi tertinggi: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 secara eksplisit memasukkan reformasi pengelolaan sampah terpadu sebagai salah satu dari 20 upaya transformasi super prioritas menuju Visi Indonesia Emas 2045 (SEB Mendagri dan Ka. Bappenas, 2024). Namun komitmen regulasi yang kuat di atas kertas belum menjamin keberhasilan di lapangan. (Aziz & Ariffin, 2024) menegaskan bahwa di Asia Tenggara, mayoritas negara menghadapi pola serupa: kebijakan pengelolaan sampah yang komprehensif secara normatif, tetapi realisasi implementasinya tertinggal jauh dari target. Kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan perkotaan, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Nyoman & Yanti, 2026).

Kota Tangerang Selatan menjadi konteks yang relevan dan paradoks sekaligus untuk mengkaji persoalan ini. Dari sisi regulasi, kota ini tergolong lengkap: Perwali Nomor 79 Tahun 2021 tentang JAKSTRADA menetapkan target pengurangan sampah hingga 30% pada 2025. Namun data kinerja menunjukkan realisasi yang masih sangat jauh dari angka itu, sementara volume timbunan justru terus meningkat dari 972,63 ton/hari (2022) menjadi 1.022,00 ton/hari (2024) (Pemerintah Kota Tangerang, 2021). (Ratnasari et al., 2023) dalam studi kebijakan pengelolaan sampah khusus di Tangerang Selatan mengonfirmasi bahwa inkohesi kebijakan antara level nasional, provinsi, dan daerah menjadi faktor yang memperlemah efektivitas implementasi. Justru karena paradoks inilah Tangerang Selatan menjadi kasus yang menarik untuk menelusuri mekanisme hambatan implementasi secara lebih sistematis dan berbasis data.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan berbagai upaya mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. (Okhtafianny & Ariani, 2023) menemukan keterbatasan anggaran dan infrastruktur sebagai hambatan

utama di daerah-daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. (Hadamuan Torang Muara & Tuti WD Retnowati, 2022) dalam kajian evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan menemukan bahwa capaian kebijakan belum optimal karena keterbatasan kinerja dan fasilitas yang tidak memadai. (Hutabarat & Mulyani, 2022) serta (Irmawartini et al., 2023) mengidentifikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber sebagai hambatan perilaku yang persisten. (Arkum et al., 2023) memfokuskan analisis pada kapasitas kelembagaan dan koordinasi dalam implementasi kebijakan persampahan perkotaan. Pada tingkat konseptual yang lebih luas, dan menegaskan bahwa di negara berkembang, kegagalan implementasi lebih sering berpangkal dari penumpukan hambatan institusional yang struktural. Sementara itu, (Nurfadhillah & Rahmawati, 2024) menganalisis ketidakefektifan implementasi di Kabupaten Bogor, namun tanpa mengukur deviasi capaian secara kuantitatif berbasis data kinerja. Posisi metodologis penelitian ini terhadap studi-studi tersebut dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Posisi Metodologis Penelitian dibandingkan Studi Terdahulu

Studi	Fokus Utama	Pengukuran Gap Berbasis Data Kinerja?	Analisis Edwards III (≥ 3 dimensi + bukti tekstual)?
Okhtafianny & Ariani (2023)	Hambatan anggaran & infrastruktur	Tidak	Tidak
Hadamuan & Retnowati (2022)	Evaluasi kebijakan sampah Tangsel	Tidak	Tidak
Nurfadhillah & Rahmawati (2024)	Ketidakefektifan implementasi	Tidak	Tidak
Arkum et al. (2023)	Kapasitas kelembagaan & koordinasi	Tidak	Tidak
Hutabarat & Mulyani (2022)	Perilaku pemilahan sampah	Tidak	Tidak
Penelitian ini	Potret deviasi capaian + diagnostik + hierarki hambatan	Ya — berbasis data kinerja LKjIP & CAGR	Ya — 4 dimensi, bukti tekstual eksplisit, structured qualitative comparison

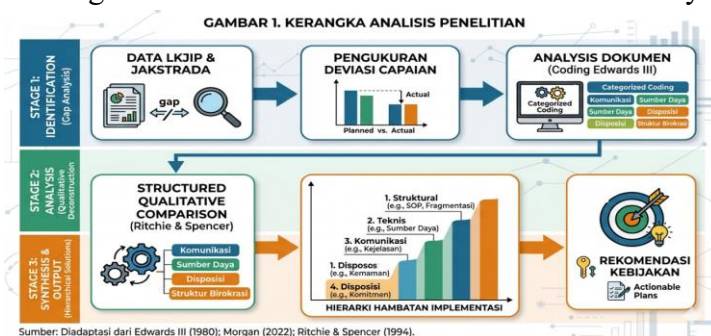
Sumber: Diolah dari tinjauan pustaka, LKjIP DLH Kota Tangerang Selatan (2024), dan Perwali No. 79/2021.

Meskipun literatur internasional telah banyak membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di negara berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada identifikasi faktor penghambat secara deskriptif tanpa mengukur deviasi capaian berbasis data kinerja pemerintah (Dinas et al., 2022). Selain itu, kajian yang secara simultan mengukur kesenjangan antara target dan realisasi kinerja serta memetakan hambatan implementasi dalam suatu struktur hierarkis berbasis tingkat pengaruh masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada konteks lokal Indonesia, tetapi juga memperkaya diskursus global mengenai bagaimana kesenjangan implementasi kebijakan dapat diukur dan didiagnosis secara lebih sistematis melalui pendekatan analisis dokumen berbasis kinerja (Abdussamad et al., 2024).

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, terdapat dua kebaruan ilmiah yang ditawarkan penelitian ini. Pertama, dari sisi substansi: pengukuran deviasi capaian berbasis data kinerja resmi (LKjIP DLH 2024) disertai kalkulasi CAGR timbulan. Kedua, dari sisi metodologi: analisis empat dimensi Edwards III secara lengkap dengan prosedur coding terdokumentasi, disertai perbandingan kualitatif terstruktur untuk menentukan hierarki relatif hambatan. Artikel ini merupakan bagian pertama dari desain penelitian dua fase (Rahman, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) Seberapa besar deviasi capaian implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan data kinerja yang tersedia? (2) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi berdasarkan analisis empat dimensi Edwards III, dan bagaimana hierarki relatifnya?

Kerangka Teoritis: Model Edwards III Dan Batasannya



Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian

Sumber: Diadaptasi dari Edwards III (1980); Morgan (2022); Ritchie & Spencer (1994).

Edwards III (1980) mengembangkan model implementasi yang membagi faktor penentu keberhasilan ke dalam empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini tergolong banyak dipakai dalam studi

implementasi kebijakan publik di Indonesia, termasuk dalam konteks kebijakan lingkungan (Nurfadhillah & Rahmawati, 2024).

Dalam penelitian ini, Edwards III tidak dipakai sebagai proposisi yang diuji secara statistik, melainkan sebagai kerangka kategorisasi analitis. Pendekatan semacam ini lazim dalam tradisi *applied policy analysis* (Dunn, 2018) maupun penelitian kebijakan publik interpretivist (Morgan, 2022). Ada tiga alasan mengapa Edwards III dipilih. Pertama, Matland's Ambiguity-Conflict Model (1995) mensyaratkan pengukuran empiris atas tingkat ambiguitas dan konflik antar aktor seperti yang ditunjukkan (Coleman et al., 2021) sementara penelitian ini tidak punya akses ke data primer aktor. Kedua, Street-Level Bureaucracy Lipsky (1980) terlalu berfokus pada diskresi pelaksana lapangan. Ketiga, Edwards III sudah cukup dikenal dalam literatur implementasi kebijakan Indonesia (Riyadi et al., 2020). Di sisi lain, ada tiga keterbatasan model ini yang perlu diakui. Pertama, Edwards III tidak menyediakan mekanisme untuk menimbang bobot relatif antar dimensi itulah mengapa penelitian ini melengkapinya dengan perbandingan kualitatif terstruktur. Kedua, model ini lahir dari konteks tata kelola Amerika Serikat, sehingga penerapannya di Indonesia perlu mempertimbangkan kompleksitas desentralisasi (Hidayat et al., 2025). Ketiga, model ini bersifat deskriptif-kategoris dan tidak dirancang untuk menjelaskan mekanisme kausal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berpijak pada paradigma interpretivist-konstruktivis (Durnová & Weible, 2020). Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen (*document analysis*) dengan analisis isi deduktif sebagai strategi utama (Morgan, 2022). Seluruh data bersifat sekunder dan tersedia secara publik. Empat sumber ditetapkan sebagai data utama: (a) LKjIP DLH Kota Tangerang Selatan 2024; (b) Perwali Nomor 79 Tahun 2021 sebagai dokumen JAKSTRADA; (c) Perpres 97/2017 dan PP 81/2012 sebagai bingkai regulasi nasional; dan (d) data SIPSN KLHK sebagai sumber triangulasi independen.

Analisis dilakukan dalam tiga langkah berurutan: (1) pengukuran deviasi capaian menggunakan rumus $CAGR = (V_n/V_0)^{(1/n)} - 1$; (2) kategorisasi hambatan menggunakan kerangka Edwards III melalui analisis isi deduktif; dan (3) perbandingan kualitatif terstruktur (*structured qualitative comparison*) antar dimensi menggunakan dua kriteria: kendala langsung (*direct constraint*) dan efek lintas dimensi (*cross-dimensional effect*).

Keabsahan penelitian dijamin melalui empat mekanisme mengacu pada kriteria keterpercayaan Lincoln & Guba (1985): (1) triangulasi sumber; (2) coding dua tahap; (3)

audit trail seluruh bukti tekstual ditampilkan eksplisit dalam Tabel 2; dan (4) deskripsi konteks yang rinci (Husnullail & Dkk, 2024).

Tabel 2. Prosedur Coding Analisis Dokumen: Definisi Operasional dan Bukti Tekstual per Dimensi

Dimensi	Definisi Operasional	Unit Analisis	Contoh Kutipan Bukti Tekstual
Komunikasi	Kejelasan dan konsistensi penyampaian substansi JAKSTRADA kepada pelaksana lapangan	Kalimat/paragraf yang merujuk sosialisasi, panduan teknis, atau transmisi pesan kebijakan lintas level	LKjIP 2024: tidak mencatat program sosialisasi yang menjangkau seluruh kelurahan secara sistematis
Sumber Daya	Ketersediaan infrastruktur fisik (TPS3R) yang proporsional terhadap volume timbulan dan terdistribusi merata	Kalimat/paragraf yang merujuk kapasitas fasilitas, distribusi TPS3R, atau ketimpangan infrastruktur	LKjIP 2024: 'peningkatan timbulan sampah belum dapat diimbangi oleh kapasitas pengelolaan yang ada, termasuk keterbatasan fasilitas TPS3R yang belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kota'
Disposisi Pelaksana	Kepatuhan dan inisiatif pelaksana melampaui kewajiban prosedural dalam menjalankan tujuan substantif kebijakan	Kalimat/paragraf yang merujuk kepatuhan prosedural, inisiatif, atau kesenjangan antara kewajiban formal dan capaian substantif	LKjIP 2024: LKjIP disusun setiap tahun (kepatuhan administratif terpenuhi), namun capaian pengurangan sampah stagnan di 13,2%
Struktur Birokrasi	Kejelasan pembagian kewenangan dan keberadaan mekanisme koordinasi lintas instansi yang terukur	Kalimat/paragraf yang merujuk koordinasi, pembagian tugas, atau mekanisme pemantauan bersama	Perwali 79/2021: amanat koordinasi lintas sektor; LKjIP 2024: 'pelaksanaannya bergantung pada inisiatif masing-masing aktor' karena tidak ada mekanisme pemantauan bersama yang terukur

Sumber: Diadaptasi dari Edwards III (1980); (Kota Tangerang Selatan, 2024) dan (Pemerintah Kota Bekasi, 2023)

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena sepenuhnya menggunakan data sekunder berbasis dokumen kinerja pemerintah tanpa pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan. Konsekuensinya, inferensi mengenai dimensi disposisi pelaksana dan dinamika koordinasi lintas aktor bersifat interpretatif berbasis bukti tekstual. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diposisikan sebagai diagnosis awal (diagnostic policy analysis) yang memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui studi lapangan dan pengumpulan data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Deviasi Capaian Berbasis Data Kinerja

Tabel 3. Pengukuran Deviasi Capaian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan

Indikator	Keterangan / Metode	Nilai
Timbulan sampah 2022	Data LKjIP DLH Kota Tangerang Selatan 2024	972,63 ton/hari
Timbulan sampah 2024	Data LKjIP DLH Kota Tangerang Selatan 2024	1.022,00 ton/hari
CAGR timbulan 2022–2024	$CAGR = (1022/972,63)^{(1/2)} - 1$	2,50% per tahun
Target JAKSTRADA 2025	Perwali 79/2021	30% pengurangan sampah
Realisasi pengurangan 2023	LKjIP DLH 2024 & SIPSN KLHK 2024	13,2%
Deviasi capaian	$30\% - 13,2\% = 16,8 \text{ pp}$ (dua tahun sebelum tenggat)	16,8 poin persentase

Sumber: LKjIP DLH Kota Tangerang Selatan (2024), SIPSN KLHK (2024), dan Perwali No. 79/2021.

Data pada Tabel 3 menunjukkan tekanan ganda yang dihadapi sistem pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan: capaian pengurangan yang stagnan di 13,2% (deviasi 16,8 poin persentase dari target JAKSTRADA 30% pada 2025), sekaligus tekanan timbulan yang terus meningkat dengan CAGR 2,5% per tahun. (Ratnasari et al., 2023), yang secara khusus mengkaji kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, mengonfirmasi bahwa inkohesi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal menjadi akar dari stagnannya capaian(KLHK, n.d.).

Analisis Hambatan Implementasi per Dimensi Edwards III

Komunikasi

LKjIP 2024 tidak mencatat program sosialisasi yang menjangkau seluruh kelurahan secara sistematis. Ini berarti transmisi substansi JAKSTRADA ke pelaksana lapangan berlangsung sporadis dan tidak terstandar. Dalam kerangka Edwards III, kelemahan pada dimensi komunikasi berpotensi memperbesar diskresi pelaksana yang tidak terarah sebuah dinamika yang juga diidentifikasi oleh (Hidayat et al., 2025) sebagai tantangan umum tata kelola desentralisasi di Indonesia.

Sumber Daya

LKjIP 2024 mencatat secara eksplisit: 'peningkatan timbulan sampah belum dapat diimbangi oleh kapasitas pengelolaan yang ada, termasuk keterbatasan fasilitas TPS3R yang belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kota.' Data SIPSN KLHK

mengonfirmasi secara independen: pada 2023, dari total timbunan 369.200 ton per tahun, 41-unit TPS3R hanya mampu memproses 15,5%. Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah TPS3R aktif turun dari 41 unit (2023) menjadi 36 unit pada 2025. (Putrawan et al., 2024) menunjukkan bahwa hanya 58,35% TPS3R di Indonesia yang beroperasi optimal pola yang konsisten dengan temuan di Tangerang Selatan.

Disposisi Pelaksana

LKjIP DLH disusun setiap tahun kepatuhan administratif terpenuhi. Tapi capaian substantifnya (13,2%) masih sangat jauh dari target. Edwards III (1980) menyebut kondisi seperti ini sebagai persoalan disposisi: kepatuhan prosedural yang tidak diikuti internalisasi tujuan substantif kebijakan, atau compliance without commitment (Tui et al., 2022). Inferensi ini bertumpu pada kesenjangan antara kepatuhan prosedural dan capaian substantif yang tercatat.

Struktur Birokrasi

Perwali 79/2021 mengamanatkan keterlibatan lintas sektor dalam pelaksanaan JAKSTRADA. Tapi LKjIP 2024 mencatat bahwa koordinasi itu 'bergantung pada inisiatif masing-masing aktor' karena tidak ada mekanisme pemantauan bersama yang terukur. (Widiyanti et al., 2026) menemukan pola serupa sebagai hambatan paling persisten dalam implementasi kebijakan persampahan perkotaan di negara berkembang.

Dari keempat dimensi yang dianalisis, hambatan pada sumber daya dan struktur birokrasi bersifat langsung dan struktural keduanya membatasi kapasitas implementasi secara nyata. Sementara hambatan pada komunikasi dan disposisi pelaksana bersifat kondisional.

Structured Qualitative Comparison dan Proposisi Hierarki Hambatan

Tabel 4. Matriks Proposisi Hierarki Hambatan Implementasi (Hipotesis Kerja)

Dimensi	Direct Constraint?	Cross-Dimensional Effect?	Kutipan Bukti Tekstual	Proposisi Hierarki
Sumber Daya	Ya langsung	Ya tinggi	'Keterbatasan fasilitas TPS3R yang belum terdistribusi secara merata' (LKjIP 2024); hanya 58,35% TPS3R nasional berfungsi optimal.	Struktural PRIORITAS: membatasi volume langsung & berdampak lintas dimensi
Struktur Birokrasi	Ya tidak langsung	Ya tinggi	'Pelaksanaannya bergantung pada inisiatif masing-masing aktor' (LKjIP 2024); koordinasi non-pemerintah kritis	Struktural TINGGI: fragmentasi koordinasi berdampak pada seluruh rantai implementasi

Komunikasi	Tidak langsung	Terbatas	Transmisi sporadis; tidak ada sosialisasi sistematis ke seluruh kelurahan (LKjIP 2024)	Kondisional: efektif setelah infrastruktur & koordinasi tersedia
Disposisi Pelaksana	Tidak langsung	Terbatas	Compliance without commitment: kepatuhan prosedural terpenuhi; capaian stagnan 13,2% (LKjIP 2024)	Kondisional: bergantung pada perbaikan kondisi struktural

Sumber: Analisis penulis berdasarkan LKjIP DLH Kota Tangerang Selatan (2024), Perwali No. 79/2021, Edwards III (1980), dan Hidayat et al. (2024). Seluruh proposisi merupakan hipotesis kerja inferensial, bukan pengukuran kausal terverifikasi.

Perbandingan dengan Tren Global dan Implikasi Kebijakan Nasional

Temuan penelitian ini sejalan dengan tren global implementasi kebijakan pengelolaan sampah di negara berkembang. Studi di Ghana, India, dan Filipina menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan lemahnya koordinasi lintas aktor merupakan hambatan paling persisten dalam implementasi kebijakan persampahan perkotaan (Zhang et al., 2024). (Ratnasari et al., 2023) mengonfirmasi dari konteks Indonesia bahwa inkohesi kebijakan antar level pemerintahan menjadi akar dari lambatnya kemajuan implementasi. Hal ini memperkuat argumen bahwa kegagalan implementasi di banyak kota berkembang lebih sering bersumber dari defisit struktural. Dengan demikian, kasus Tangerang Selatan merepresentasikan pola yang lebih luas dalam tata kelola persampahan perkotaan di Global South.

Meskipun penelitian ini berfokus pada Kota Tangerang Selatan, implikasinya relevan bagi implementasi JAKSTRADA di kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi karakteristik serupa sebagai kota penyangga metropolitan. Pola hambatan struktural yang ditemukan menunjukkan bahwa percepatan pencapaian target nasional pengurangan sampah 30% pada 2025 memerlukan penguatan kapasitas infrastruktur dan mekanisme koordinasi lintas instansi di tingkat pemerintah daerah (Abdussamad et al., 2024b).

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Tabel 5. Rekomendasi Kebijakan dengan Target Operasional dan Indikator Pemantauan

No.	Rekomendasi	Target Operasional	Indikator Pemantauan	Basis Dimensi
1	Penguatan kapasitas TPS3R berbasis pemetaan spasial timbulan per kelurahan	Pemetaan kebutuhan TPS3R per kelurahan; penambahan unit pada kelurahan dengan defisit kapasitas tertinggi	Rasio kapasitas TPS3R terhadap volume timbulan harian per kelurahan, dilaporkan dalam LKjIP tahunan	Sumber Daya — direct constraint tertinggi

2	Pembentukan forum koordinasi JAKSTRADA lintas instansi dengan mandat terformalisasi	Forum melibatkan DLH, Kecamatan, Kelurahan, dan bank sampah; mandat dalam regulasi turunan Perwali; rapat evaluasi triwulanan	Frekuensi rapat terlaksana vs mandatori; dashboard pemantauan capaian bersama per triwulan	Struktur Birokrasi — cross-dimensional effect tertinggi
3	Protokol sosialisasi JAKSTRADA terstandar berbasis kelurahan	Minimal 1 sesi sosialisasi per kelurahan per semester; efektif diimplementasikan setelah infrastruktur TPS3R tersedia	Persentase kelurahan yang mendapat sosialisasi per tahun; dilaporkan dalam LKjIP	Komunikasi — kondisional; efektif setelah Rek. 1 dan 2 terlaksana

Sumber: Analisis penulis. Urutan prioritas didasarkan pada proposisi hierarki hambatan (Tabel 4). Rekomendasi 1 dan 2 merupakan prasyarat efektivitas Rekomendasi 3.

Kontribusi Teoretis Penelitian

Penelitian ini memberikan dua kontribusi teoretis terhadap studi implementasi kebijakan. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa model Edwards III dapat digunakan tidak hanya sebagai alat kategorisasi faktor implementasi, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun proposisi hierarki hambatan melalui perbandingan kualitatif terstruktur. Pendekatan ini memperluas penggunaan Edwards III dari sekadar kerangka deskriptif menjadi alat diagnostik kebijakan berbasis data kinerja. Kedua, penelitian ini memperkenalkan integrasi antara pengukuran deviasi capaian berbasis data kinerja pemerintah dan analisis hambatan implementasi dalam satu desain penelitian. Integrasi ini memperkaya pendekatan implementasi kebijakan yang selama ini cenderung memisahkan analisis kinerja dan analisis proses implementasi sebuah kontribusi yang juga relevan bagi kasus-kasus serupa di kota-kota menengah Asia Tenggara.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengukur deviasi capaian implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan dan mengidentifikasi faktor penghambat beserta hierarki relatifnya melalui kerangka Edwards III. Dua simpulan utama dapat ditarik. Pertama, deviasi capaian pada 2023 mencapai 16,8 poin persentase realisasi pengurangan sampah hanya 13,2% dari target JAKSTRADA 30% pada 2025 disertai tekanan timbulan yang terus meningkat dengan CAGR 2,5% per tahun (dari 972,63 ton/hari pada 2022 menjadi 1.022,00 ton/hari pada 2024). Ini menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah menghadapi tekanan ganda: capaian pengurangan stagnan sementara beban timbulan terus bertambah.

Kedua, dari analisis empat dimensi Edwards III, keterbatasan kapasitas TPS3R (dimensi sumber daya) dan fragmentasi koordinasi lintas instansi tanpa mekanisme pemantauan yang terukur (dimensi struktur birokrasi) terbukti sebagai hambatan struktural dengan kendala langsung dan efek lintas dimensi tertinggi. Hambatan

komunikasi dan disposisi pelaksana bersifat kondisional keduanya baru dapat diatasi secara efektif setelah dua hambatan struktural tersebut lebih dahulu diperbaiki. Secara keseluruhan, kegagalan mencapai target kebijakan pengelolaan sampah berakar dari defisit struktural yang menumpuk, bukan semata dari kelemahan teknis atau rendahnya komitmen pelaksana secara individual.

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini menyarankan tiga hal untuk tindak lanjut. Pertama, DLH Kota Tangerang Selatan perlu memprioritaskan pemetaan spasial kebutuhan TPS3R per kelurahan berbasis data timbulan aktual dan penambahan unit pada wilayah dengan defisit kapasitas tertinggi, sebelum program sosialisasi kebijakan diperluas. Kedua, perlu dibentuk forum koordinasi JAKSTRADA lintas instansi dengan mandat terformalisasi dalam regulasi turunan Perwali, dilengkapi mekanisme pemantauan dan dashboard capaian bersama yang dilaporkan secara triwulanan.

Ketiga, proposisi hierarki hambatan yang dihasilkan penelitian ini perlu dikonfirmasi melalui data primer wawancara mendalam dengan aparat DLH, pelaksana kelurahan, dan komunitas bank sampah. Adapun beberapa keterbatasan penelitian ini perlu diakui secara eksplisit. Seluruh data bersifat sekunder dengan satu titik waktu pengukuran (2023). Karakteristik khas Tangerang Selatan sebagai kota suburban berpendapatan menengah-tinggi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta perlu diperlakukan sebagai variabel kontekstual dalam generalisasi ke daerah lain.

Selain itu, penggunaan satu pengkode dalam proses analisis dokumen berpotensi menimbulkan bias interpretasi, meskipun telah diminimalkan melalui prosedur audit trail dan coding dua tahap. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan lebih dari satu pengkode untuk meningkatkan reliabilitas analisis. Penelitian selanjutnya direkomendasikan menguji proposisi hierarki hambatan melalui desain mixed methods yang mengombinasikan analisis dokumen, wawancara mendalam, dan survei pelaksana kebijakan. Pendekatan tersebut memungkinkan pengujian hubungan kausal antar dimensi implementasi sekaligus meningkatkan reliabilitas inferensi. Selain itu, studi komparatif antar kota penyangga metropolitan di Indonesia penting dilakukan untuk menguji transferabilitas temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Sakir, M., & Dunggio, S. (2024a). *Tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik di kantor lurah wongkaditi timur. 11*, 353–361.
- Abdussamad, J., Sakir, M., & Dunggio, S. (2024b). *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik di Kantor Lurah Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 11*(1), 353–361.
- Amaysah, A., Ngadisah, N., & Rahman, D. A. (2024). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2021. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi*

Dan Pelayanan Publik, 11(2), 740–755.

- Arkum, D., Handini, W., & Kurniawan, R. (2023). Jurnal Administrasi Negara (Studia Administrasi) Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 121. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 129.
- Aziz, M. F. A., & Ariffin, R. N. R. (2024). a Systematic Literature Review of Solid Waste Management Policy Implementation in Southeast Asia. *Journal of Sustainability Science and Management*, 19(4), 151–169. <https://doi.org/10.46754/jssm.2024.04.012>
- Coleman, A., Billings, J., Allen, P., Mikelyte, R., Croke, S., MacInnes, J., & Checkland, K. (2021). Ambiguity and Conflict in Policy Implementation: The Case of the New Care Models (Vanguard) Programme in England. *Journal of Social Policy*, 50(2), 285–304. <https://doi.org/10.1017/S0047279420000082>
- Dinas, D. I., Dan, K., & Sipil, C. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Melalui E-Government. *IX*(1), 254–263.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis*.
- Durnová, A. P., & Weible, C. M. (2020). Tempest in a teapot? Toward new collaborations between mainstream policy process studies and interpretive policy studies. *Policy Sciences*, 53(3), 571–588. <https://doi.org/10.1007/s11077-020-09387-y>
- Hadomuan Torang Muara, & Tuti WD Retnowati. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 13, 1–8. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/4504/2168>
- Hidayat, A. R., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2025). Why Democratization and Decentralization in Indonesia Have Mixed Results on the Ground: A Systematic Literature Review. *Public Administration and Development*, 45(2), 159–172. <https://doi.org/10.1002/pad.2095>
- Husnullail, M., & Dkk. (2024). Teknik Pemeriksaan Data Dalam Riset Ilmiah. *Genta Mulia*, 15(2), 70–78.
- Hutabarat, L., & Mulyani, A. (2022). Analisis Korelasi Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Perilaku Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Dusun Pade Mare Lombok Utara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 646–653. <https://doi.org/10.14710/jil.20.3.646-653>
- Irmawartini, I., Mulyati, S. S., & Pujiono, P. (2023). Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir di Kota Bandung. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 22(2), 229–236. <https://doi.org/10.14710/jkli.22.2.229-236>
- KLHK, S. (n.d.). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. 2024.

<https://sampahnasional.kemenlh.go.id/>

- Kota Tangerang Selatan. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. *Qualitative Report*, 27(1), 64–77. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Nurfadhillah, A., & Rahmawati, R. (2024). Analisis Ketidakefektifan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bogor Melalui Lensa Teori Struktural Fungsionalisme Analysing The Ineffectiveness Of Waste Management In Bogor District Through The Lens Of Structural Functionalism Theory. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 2715–2499. <https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/12297>
- Nyoman, N., & Yanti, K. (2026). *Analisis Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Indonesia : Studi Literatur Tentang Efektivitas Implementasi Dan*. 18(1), 100–119.
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537–550. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Pemerintah Kota Bekasi. (2023). *Perwali* (hal. 1–9).
- Pemerintah Kota Tangerang. (2021). *PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2021* (Vol. 2, hal. 306–312).
- Putrawan, I. D. G. A., Azharuddin, A., Komariah, H., & Egashira, R. (2024). Techno-economic analysis of cleaner alternatives for recovering ammonium chloride from wastewater generated by polyvinyl chloride thermal stabilizer plants. *Cleaner Engineering and Technology*, 21(June), 100787. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2024.100787>
- Rahman, D. A. (2024). *Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2021*. 11, 740–755.
- Ratnasari, S., Mizuno, K., Herdiansyah, H., & Simanjutak, E. G. H. (2023). Enhancing Sustainability Development for Waste Management through National–Local Policy Dynamics. *Sustainability (Switzerland)*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/su15086560>
- Riyadi, R., Nimran, U., Sukoharsono, E. G., & Musadieg, M. Al. (2020). Factors That Affect User Satisfaction Of Electronic Learning Management Systems (ELMSs). *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 8–14. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.3>
- SEB Mendagri dan Ka. Bappenas. (2024). *Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri No. 600.1/176/SJ dengan Bappena No.1 Tahun 2024 tentang Pedoman menyusun RPJPD Tahun 2025-2045*.

- Tui, F. P., Ilato, R., & Katili, A. Y. (2022). Inovasi pelayanan publik melalui E-government di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Gorontalo. *Publik: jurnal manajemen sumber daya manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(2), 254–263.
- Widiyanti, A., Selvia, S. I., & Dwiyanaputra, R. (2026). *Implementasi Konsep Community Driven Material Recovery Facilities (C- Dmrf) Sebagai Upaya Penanganan Terintegrasi Sampah Wisata Di Gili Trawangan*.
- Zhang, Z., Chen, Z., Zhang, J., Liu, Y., Chen, L., Yang, M., Osman, A. I., Farghali, M., Liu, E., Hassan, D., Ihara, I., Lu, K., Rooney, D. W., & Yap, P. S. (2024). Municipal solid waste management challenges in developing regions: A comprehensive review and future perspectives for Asia and Africa. *Science of the Total Environment*, 930(February), 172794. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.172794>